

ABSTRAK

PENERAPAN ASAS SUBSIDER DALAM PIDANA DENDA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PAJAK (Studi Putusan PN Nomor 82/Pid.Sus/2021/ PN Kot)

Oleh :

Muhammad Hidayatullah

Tindak pidana penggelapan pajak merupakan bentuk *economic crime* yang memiliki karakteristik khusus, baik dari segi pembuktian maupun pembedanaannya, karena secara langsung berdampak pada kerugian keuangan negara. Salah satu problematika yang sering muncul dalam praktik peradilan pidana pajak adalah penerapan pidana denda yang sangat besar dengan ancaman pidana kurungan sebagai subsidier apabila denda tersebut tidak dibayarkan. Kondisi ini menimbulkan perdebatan terkait keadilan substantif, efektivitas pembedanaan, serta kesesuaiannya dengan tujuan hukum pidana perpajakan yang pada dasarnya lebih mengedepankan pemulihan kerugian negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana denda dan pidana kurungan subsidier dalam perkara penggelapan pajak, khususnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Kot, serta menilai relevansi putusan tersebut dalam konteks perkembangan hukum perpajakan pasca perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta akademisi di bidang hukum pidana dan hukum administrasi negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pidana kurungan subsidier dalam perkara penggelapan pajak pada saat putusan dijatuhkan merupakan konsekuensi formil dari ketentuan hukum yang berlaku, namun secara substantif masih menimbulkan persoalan keadilan dan efektivitas pembedanaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas subsidier dalam pidana denda terhadap tindak pidana penggelapan pajak belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana perpajakan. Dalam praktiknya, pidana kurungan sebagai pengganti denda masih sering dijatuhkan tanpa mempertimbangkan secara optimal tujuan utama pembedanaan di bidang perpajakan, yaitu pemulihan kerugian negara. Selain itu, mekanisme pelaksanaan pidana denda

Muhammad Hidayatullah

subsider belum sepenuhnya efektif dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan, terutama ketika terpidana memilih menjalani pidana kurungan daripada membayar denda, sehingga potensi penerimaan negara tidak terpenuhi secara maksimal. Penelitian ini juga menemukan bahwa secara normatif pengaturan mengenai pidana denda dan subsider telah memberikan dasar hukum yang jelas, namun dalam implementasinya masih diperlukan penegasan kebijakan dan optimalisasi penegakan hukum agar lebih berorientasi pada pemulihan kerugian negara serta efektivitas sistem perpajakan.

Saran dari penelitian ini merekomendasikan perlunya perumusan pedoman pemidanaan perpajakan yang lebih menekankan asas proporsionalitas, kemampuan ekonomi wajib pajak, serta optimalisasi mekanisme administratif guna menjamin keadilan substantif dan efektivitas pemulihan kerugian negara di masa mendatang.

Kata Kunci: Asas Subsider, Penggelapan Pajak, Pidana Denda

ABSTRACT

APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF SUBSIDIARY FINES IN TAX EVACUATION

(Study of District Court Decision Number 82/Pid.Sus/2021/PN Kot)

By:

Muhammad Hidayatullah

Tax evasion is a form of economic crime with special characteristics, both in terms of evidence and punishment, because it directly impacts state financial losses. One problem that often arises in tax criminal justice practice is the imposition of very large fines with the threat of subsidiary imprisonment if the fines are not paid. This situation has given rise to debate regarding substantive justice, the effectiveness of punishment, and its suitability with the objectives of tax criminal law, which essentially prioritizes the recovery of state losses. This study aims to analyze the legal basis for the Panel of Judges in imposing fines and subsidiary imprisonment in tax evasion cases, specifically in the Kota Agung District Court Decision Number 82/Pid.Sus/2021/PN Kot. It also assesses the relevance of this decision in the context of developments in tax law following the amendment to the Law on General Provisions and Tax Procedures through the Law on Harmonization of Tax Regulations.

The approach used is a normative juridical method supported by an empirical juridical approach. Data were obtained through literature review and interviews with judges who examined and adjudicated the case a quo, as well as academics in the fields of criminal law and state administrative law. The results of the study indicate that the application of subsidiary imprisonment in tax evasion cases at the time of the verdict is a formal consequence of the applicable legal provisions, but substantively still raises issues of justice and effectiveness of the punishment.

The results of this study indicate that the application of the subsidiary principle in criminal fines for tax evasion does not fully reflect the principle of ultimum remedium in criminal tax law. In practice, imprisonment in lieu of fines is still often imposed without optimally considering the main objective of criminal punishment in the tax sector, namely the recovery of state losses. In addition, the mechanism for implementing subsidiary fines is not fully effective in ensuring legal certainty and justice, especially when convicts choose to serve imprisonment rather than pay

Muhammad Hidayatullah

finer, so that potential state revenues are not optimally met. This study also found that normatively, the regulations regarding fines and subsidiary fines have provided a clear legal basis, but in their implementation, policy clarification and optimization of law enforcement are still needed to be more oriented towards the recovery of state losses and the effectiveness of the tax system.

Recommendations from this study recommend the need to formulate guidelines for tax punishment that emphasize the principle of proportionality, the taxpayer's economic capacity, and the optimization of administrative mechanisms to ensure substantive justice and the effectiveness of recovery of state losses in the future.

Keywords: *Subsidiary Principle, Tax Evasion, Fines.*